

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Laporan Keuangan

Teori utama yang dipakai atas penelitian ini yang berkaitan dengan laporan keuangan, yaitu Teori Akuntansi Positif yang dijabarkan oleh Watts dan Zimmerman (1985) dalam (Handayani, 2020), melihat akuntansi dan lembaga-lembaganya atas hasil dari proses politik. Standar akuntansi muncul dari keutamaan yang bersifat pragmatis. teori akuntansi positif mengakui bahwasanya prinsip akuntansi ialah hasil interaksi manusia. Jadi, sementara seseorang mungkin sinis terkait standar akuntansi yang berasal dari regulasi, seseorang pula dapat membayangkan prinsip-prinsip yang mungkin timbul secara sukarela antara individu yang berkontrak secara bebas tanpa regulasi (Ermawijaya & Endang, 2023).

Teori akuntansi positif ialah pendekatan dalam ilmu akuntansi yang bertujuan guna menjelaskan dan memprediksi praktik akuntansi yang sebenarnya dilakukan oleh perusahaan, bukan menilai apakah praktik itu seharusnya dilakukan ataupun tidak. Berbeda dengan teori normatif yang bersifat preskriptif, teori akuntansi positif lebih fokus pada pengamatan empiris terhadap perilaku manajemen, pemangku keutamaan, dan regulasi dalam konteks pelaporan keuangan (Hernis, 2020).

Teori ini berasumsi bahwasanya individu bertindak berdasarkan keutamaan ekonomi mereka, sehingga kebijakan akuntansi yang dipilih sering kali dipengaruhi oleh insentif seperti penghindaran pajak, kepatuhan terhadap kontrak, ataupun pelaporan laba yang menguntungkan (Arif et al., 2023). Teori ini selaras dengan prinsip laporan keuangan dan pengakuan pendapatan serta beban yang telah dijelaskan sebelumnya pada bagian latar belakang penelitian ini.

Terkait definisi Laporan keuangan, ialah ringkasan kegiatan operasional, pendanaan, dan investasi suatu bisnis. Laporan keuangan harus menyediakan informasi yang berguna bagi investor dan kreditor dalam pengambilan keputusan kredit, investasi, dan bisnis lainnya. Kegunaan ini berarti bahwasanya investor dan kreditor dapat menggunakan pernyataan ini guna memprediksi, membandingkan, dan mengevaluasi jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan (Serdarevic & Muratovic-Dedic, 2021). Dengan kata lain, laporan keuangan memberi informasi yang dibutuhkan guna menilai kinerja suatu perusahaan. pendapatan masa depan dan, oleh karena itu, arus kas yang disemogakan akan dihasilkan dari pendapatan (Husna, 2022).

Berdasarkan kerangka konseptual, laporan keuangan suatu perusahaan yang sahamnya diperdagangkan secara publik harus, selaras hukum, diaudit setidaknya setiap tahun oleh akuntan publik independen (yaitu, akuntan yang tidak dipekerjakan oleh perusahaan) (Apriada et al., 2023). Dalam audit semacam itu, akuntan memeriksa laporan keuangan dan data dari mana Laporan-laporan ini disusun dan membuktikan melalui opini auditor yang dipublikasikan bahwasanya

laporan-laporan ini telah disusun selaras dengan prinsip akuntansi umum ataupun SAK (Nicholas & Syaiful, 2023). Laporan keuangan dibuat menggunakan beberapa asumsi yang memengaruhi cara menggunakan dan menafsirkan data keuangan, yaitu (Sulbahri et al., 2022):

1. Transaksi dicatat berdasarkan biaya historis. Oleh karena itu, nilai yang ditampilkan pada laporan bukan nilai pasar ataupun nilai pengganti, melainkan mencerminkan biaya awal (diselaraskan dengan penyusutan guna aset yang dapat disusutkan).
2. Laporan keuangan dicatat guna periode waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Umumnya, laporan keuangan disusun guna mencakup tahun ataupun kuartal fiskal tertentu, dengan laporan laba rugi dan laporan arus kas mencakup periode tertentu, serta neraca dan laporan ekuitas pemegang saham pada akhir periode yang ditentukan. Namun, karena akhir tahun fiskal umumnya dipilih bertepatan dengan titik terendah aktivitas dalam siklus operasi, neraca tahunan dan laporan ekuitas pemegang saham mungkin tidak mewakili nilai guna tahun itu.
3. Laporan keuangan disusun menggunakan akuntansi akrual dan prinsip pencocokan. Sebagian besar bisnis menggunakan akuntansi akrual, di mana pendapatan dan laba dicocokkan dalam waktu tertentu sehingga pendapatan dicatat pada periode perolehannya dan beban dilaporkan pada periode adanya, dalam upaya menghasilkan pendapatan. Hasil dari penggunaan akuntansi akrual ialah bahwasanya laba yang dilaporkan tidak selalu sama dengan arus kas. Karena analisis keuangan pada akhirnya berfokus pada arus kas, ia seringkali

harus memahami bagaimana laba yang dilaporkan berkaitan dengan arus kas perusahaan.

4. Diasumsikan bahwasanya bisnis itu akan terus beroperasi. Asumsi bahwasanya perusahaan akan terus beroperasi tanpa batas waktu membenarkan penggunaan biaya historis, alih-alih nilai pasar saat ini, karena aset-aset ini diperkirakan akan habis seiring waktu, alih-alih dijual.
5. Pengungkapan penuh mengharuskan penyediaan informasi di luar laporan keuangan. Persyaratan pengungkapan penuh berarti bahwasanya, selain angka-angka akuntansi guna pos-pos akuntansi seperti pendapatan, beban, dan aset, pengungkapan naratif dan numerik tambahan pula dicantumkan pada Catatan yang menyertai laporan keuangan.
6. Pernyataan disusun dengan asumsi konservatisme. Dalam kasus di mana ada lebih dari satu interpretasi atas suatu peristiwa, pernyataan disusun menggunakan interpretasi yang paling konservatif.

Selaras Imam Setia Permana (Permana et al., 2022) Laporan keuangan pula dapat dijelaskan atas hasil akhir dari proses akuntansi yang mendeskripsikan kinerja dan kondisi keuangan suatu entitas dalam periode tertentu secara sistematis dan terstruktur. Laporan ini mencakup informasi historis yang telah dicatat, diklasifikasikan, dan diringkas selaras dengan standar akuntansi yang ada (Cao & Song, 2023). Laporan keuangan utama tersusun atas neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan atasnya.

Neraca ialah laporan aset, liabilitas, dan ekuitas suatu perusahaan pada suatu waktu, umumnya pada akhir kuartal fiskal ataupun tahun fiskal. Aset ialah sumber daya perusahaan, yang tersusun atas aset lancar ataupun aset jangka panjang. Bagaimana perusahaan membiayai sumber daya ini? Hal ini dicapai dengan liabilitas dan ekuitas. Liabilitas ialah kewajiban perusahaan yang harus dilunasi di masa mendatang, sedangkan ekuitas ialah kepemilikan perusahaan (Dwi Utami et al., 2023).

Sedangkan, Ekuitas suatu perusahaan ialah kepemilikan saham. Nilai buku ekuitas, yang bagi korporasi sering disebut atas ekuitas pemegang saham, pada dasarnya ialah jumlah yang dibayarkan investor atas perusahaan atas kepemilikan saham mereka, ditambah laba (ataupun dikurangi kerugian), dan dikurangi distribusi atas pemilik. Selain neraca, dijelaskan lebih detail pula terkait laporan laba rugi. Laporan laba rugi ialah ringkasan kinerja operasional selama periode tertentu (misalnya, satu kuartal fiskal ataupun satu tahun fiskal) (Rahman et al., 2021). Kita mulai dengan pendapatan perusahaan selama periode tertentu, lalu mengurangi biaya dan beban yang terkait dengan pendapatan itu. Inti dari laporan laba rugi tersusun atas laba pemilik guna periode itu.

Meskipun struktur laporan laba rugi bervariasi berdasarkan perusahaan, Ide dasarnya ialah menyajikan hasil operasi terlebih dahulu, diikuti oleh hasil nonoperasi. hasil. Biaya penjualan, pula disebut atas biaya barang yang dijual, dikurangkan dari pendapatan, menghasilkan laba kotor; yaitu laba tanpa memperhitungkan semua biaya operasional umum lainnya. Biaya operasional

umum ini ialah biaya-biaya yang biaya yang berkaitan dengan dukungan operasi umum perusahaan, yang meliputi gaji, biaya pemasaran, serta penelitian dan pengembangan. Penyusutan, yang ialah biaya diamortisasi aset fisik, pula dikurangkan dari laba kotor. Jumlah biaya penyusutan mewakili biaya dari keausan pada properti, pabrik, dan peralatan perusahaan (Sari et al., 2020).

Manajemen perusahaan selalu memiliki kemampuan guna mengelola laba melalui pemilihan metode akuntansi yang cermat selaras kerangka SAK. "Pengawas" perusahaan (yaitu, auditor independen) seharusnya mengawasi manajemen perusahaan. Namun, skandal yang ada di industri keuangan mengungkapkan bahwasanya fungsi pengawas dari kantor akuntan publik independen tidak berjalan dengan baik. Selain itu, manajemen beberapa perusahaan menggunakan manipulasi hasil keuangan dan penipuan guna mendistorsi kondisi keuangan mereka (Syafar et al., 2020).

Sehingga, dalam dunia perbankan, penyusunan laporan keuangan tidak hanya mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), namun pula mengikuti ketentuan khusus dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Melalui regulasi seperti POJK No. 6/POJK.03/2015 terkait Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, OJK mendorong setiap institusi keuangan guna menyajikan informasi yang terbuka, jelas, dan bertanggung jawab. Tujuannya ialah guna memperkuat kepercayaan masyarakat serta menjaga stabilitas sistem keuangan nasional (S et al., 2022).

Tidak cukup hanya patuh terhadap PSAK, laporan keuangan perbankan pula disemogakan mampu mencerminkan kondisi riil dari kesehatan keuangan dan

potensi risiko yang dihadapi lembaga itu. pada laporan Stabilitas Sistem Keuangan (LSSK) OJK tahun 2023, disebutkan bahwasanya keterbukaan informasi menjadi elemen utama dalam mengurangi risiko sistemik yang bisa berdampak luas (Syafar et al., 2020).

Barth et al. (2004) dalam (Istanti, 2022) menemukan bahwasanya regulasi terkait transparansi yang lebih kuat terkait dengan perkembangan perbankan yang lebih baik dan lebih rendahnya insiden krisis perbankan, konsisten dengan transparansi perbankan yang mendorong kesehatan keuangan sistem perbankan. Meskipun transparansi perbankan sangat utama bagi industri perbankan. kumpulan informasi khusus pada laporan keuangan memainkan peran mendasar dalam pengawasan kehati-hatian bank. Peraturan perbankan seperti PSAK yang secara langsung mengatur perilaku pelaporan dan pengungkapan. Manajer bank memiliki insentif guna mengelola jumlah akuntansi guna memenuhi persyaratan modal regulasi yang menutupi substansi ekonomi bank dan dengan demikian mengurangi keinformatifan laporan keuangannya. Peraturan akuntansi bank yang lebih ketat menyebabkan guna pelaporan dan pengungkapan yang lebih luas dan komprehensif.

Bagi lembaga keuangan seperti Bank Perekonomian Rakyat (BPR), kepatuhan terhadap standar pelaporan keuangan bukan hanya kewajiban regulasi, namun pula bagian dari upaya membangun tata kelola yang sehat. Dengan posisi strategis BPR dalam melayani pelaku UMKM dan masyarakat daerah, kualitas

laporan keuangan menjadi cerminan dari komitmen lembaga terhadap prinsip *good corporate governance* dan transparansi (Hari et al., 2021).

Laporan keuangan memainkan peran utama dalam membantu para pemegang saham dan manajemen mengambil keputusan yang tepat, terutama terkait investasi dan pendanaan. satu diantara tujuan utama akuntansi ialah menyajikan informasi yang mencerminkan kinerja keuangan, posisi keuangan, serta perubahan-perubahan yang ada dalam periode tertentu berdasarkan prinsip akuntansi yang ada umum. Informasi ini bertujuan agar para pengguna laporan keuangan bisa menilai sejauh mana perusahaan dapat dikelola secara efisien dan bertanggung jawab (Zainudin & Ristiana, 2021).

Secara lebih spesifik, laporan keuangan memberi gambaran terkait kemampuan perusahaan dalam mengelola sumber dayanya guna tumbuh dan berkembang. Selain itu, laporan ini pula membantu dalam mengukur kapasitas perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansial, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan internal, serta mengevaluasi bagaimana strategi investasi dan pembiayaan dijalankan oleh manajemen.

Laporan keuangan pula menyajikan informasi keuangan yang selaras dan dapat diandalkan guna memperlihatkan posisi aset bersih perusahaan. Data ini sangat utama bagi investor karena memberi proyeksi terkait potensi dividen yang bisa mereka terima di masa depan. Selain itu, laporan keuangan menjelaskan sejauh mana perusahaan mampu membayar utangnya atas pihak luar seperti pemasok, kreditur, dan pemerintah, serta kemampuan perusahaan dalam menarik pendanaan

tambahan guna ekspansi bisnis. Informasi ini pula berfungsi atas dasar dalam penyusunan anggaran bisnis dan mengevaluasi prospek jangka panjang perusahaan (Rahman et al., 2021).

Dalam dunia akuntansi dan keuangan, laporan keuangan ialah alat utama guna menyampaikan informasi keuangan perusahaan atas berbagai pihak yang berkeutamaan. Setiap jenis laporan memiliki fungsi dan tujuannya masing-masing dalam mendeskripsikan kondisi dan kinerja perusahaan (Damayanti, 2021).

1. Laporan Laba Rugi

Laporan ini menyajikan informasi terkait pendapatan dan beban perusahaan selama periode tertentu, sehingga menghasilkan laba ataupun rugi bersih. Melalui laporan ini, pengguna dapat memahami sejauh mana kegiatan operasional perusahaan berhasil menghasilkan keuntungan ataupun mengalami kerugian (Damayanti, 2021).

2. Laporan Perubahan Ekuitas (Laporan Ekuitas)

Laporan ini menampilkan perubahan yang ada dalam modal pemilik selama satu periode, seperti tambahan modal, pembagian laba, ataupun rugi. Selain mencerminkan hak pemilik terhadap aset bersih perusahaan, laporan ini pula dapat dijadikan indikator apakah investasi yang dilakukan oleh pemilik ataupun investor mengalami pertumbuhan ataupun penurunan (Leony & Pambudi, 2023).

3. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

Laporan ini mendeskripsikan posisi keuangan perusahaan pada titik waktu tertentu, mencakup tiga elemen utama (Syahputri & Kananto, 2020):

- Aset ialah segala sesuatu yang dimiliki perusahaan dan memiliki nilai. Aset ini dapat berwujud fisik ataupun tidak. Contoh aset fisik meliputi persediaan yang akan dijual, perabot kantor, dan peralatan produksi. Jika suatu aset tidak berwujud fisik, kita menyebutnya atas aset tidak berwujud, seperti merek dagang ataupun paten. Aset tidak berwujud tidak dapat dilihat ataupun disentuh, namun tetap memberi nilai bagi perusahaan. Aset pula bisa berupa aset lancar ataupun jangka panjang, tergantung pada seberapa cepat perusahaan dapat mengubahnya menjadi uang tunai. Aset umumnya dilaporkan dalam neraca berdasarkan urutan likuiditas, dengan aset paling likuid tercantum pertama dan aset yang paling tidak likuid tercantum terakhir. Aset perusahaan yang paling likuid ialah aset lancar. Aset lancar ialah aset yang dapat diuangkan dalam satu siklus operasi ataupun satu tahun, mana yang lebih lama. Hal ini berbeda dengan aset tidak lancar, yang tidak dapat dilikuidasi dengan cepat. Sedangkan, Aset tidak lancar tersusun atas aset fisik dan nonfisik. Aset pabrik ialah aset fisik, seperti bangunan dan peralatan, dan tercermin dalam neraca atas aset pabrik dan peralatan bruto dan aset pabrik dan peralatan neto.
- Liabilitas, umumnya menggunakan istilah "kewajiban" dan "utang" atas sinonim, meskipun "kewajiban" sebenarnya ialah istilah yang lebih

luas, tidak hanya mencakup kontrak eksplisit yang dimiliki perusahaan, dalam hal kewajiban utang jangka pendek dan jangka panjang, namun pula mencakup kewajiban yang tidak ditentukan dalam kontrak, seperti kewajiban lingkungan ataupun kewajiban pelunasan aset. Kewajiban dapat berupa utang berbunga, seperti penerbitan obligasi, ataupun utang tidak berbunga, seperti jumlah yang harus dibayarkan atas pemasok. Dalam neraca, liabilitas disajikan berdasarkan tanggal jatuh tempo dan sering kali dibagi menjadi dua kategori: liabilitas lancar dan liabilitas jangka panjang. Liabilitas lancar ialah kewajiban yang jatuh tempo dalam satu tahun ataupun satu siklus operasi (mana yang lebih lama) seperti hutang usaha, upah/ gaji yang harus dibayarkan, dan pinjaman bank jangka pendek. Kewajiban jangka panjang ialah kewajiban yang jatuh tempo lebih dari satu tahun. Ada beberapa jenis kewajiban jangka Panjang, seperti wesel bayar dan obligasi.

- Ekuitas, pada dasarnya ialah jumlah yang dibayarkan investor atas perusahaan atas kepemilikan saham mereka, ditambah laba (ataupun dikurangi kerugian), dan dikurangi distribusi atas pemilik. Bagi korporasi, ekuitas ialah jumlah yang dibayarkan investor atas korporasi atas saham saat pertama kali dijual, ditambah ataupun dikurangi laba ataupun rugi, dikurangi dividen yang dibayarkan.

Ketiga elemen ini saling terkait dan membentuk persamaan dasar akuntansi:

$$\text{Aset} = \text{Liabilitas} + \text{Ekuitas}$$
 yang menjadi fondasi dalam penyusunan laporan keuangan.

4. Laporan Arus Kas

Laporan ini memperlihatkan aliran masuk dan keluar kas dalam tiga aktivitas utama (Amiruddin, 2022):

- Aktivitas Operasi, yang berkaitan dengan transaksi utama bisnis sehari-hari seperti penerimaan dari penjualan dan pembayaran biaya operasional.
- Aktivitas Investasi, mencakup pembelian ataupun penjualan aset tetap. Pengeluaran pada aktivitas ini umumnya dianggap positif karena memperlihatkan ekspansi bisnis.
- Aktivitas Pendanaan, mendeskripsikan aliran kas dari dan ke pemilik serta kreditur, seperti penerimaan pinjaman ataupun pembayaran dividen.

Laporan ini sangat utama guna mengevaluasi likuiditas dan ketahanan perusahaan dalam menghadapi kewajiban jangka pendek ataupun krisis keuangan.

2.1.2 Pendapatan

2.1.2.1 Definisi Pendapatan

Satu diantara tujuan utama pendirian suatu perusahaan ialah mendapatkan pendapatan secara berkelanjutan guna menghasilkan laba. Dalam konteks ini, pendapatan menjadi komponen vital yang secara langsung memengaruhi performa keuangan perusahaan dan kelangsungan operasionalnya. Pendapatan

mencerminkan hasil dari aktivitas utama perusahaan, baik berupa penjualan produk ataupun pemberian jasa atas pelanggan, serta aktivitas lain yang mendatangkan manfaat ekonomi (Anjarwati & Safri, 2022).

selaras Ikatan Akuntan Indonesia (2021), dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), pendapatan didefinisikan atas hasil dari aktivitas operasional yang meliputi penjualan barang, jasa, bunga, dividen, dan bentuk kompensasi. Desrianto menambahkan bahwasanya pendapatan ialah peningkatan aset ataupun penurunan kewajiban atas hasil dari aktivitas usaha dalam memberi barang ataupun jasa atas pelanggan (Khaeria et al., 2023).

Pendapatan ialah satu diantara ukuran terutama kinerja keuangan perusahaan. Pendapatan memberi informasi terkait laba kotor yang direalisasikan dari aktivitas bisnisnya, yang berguna guna menilai seberapa baik kinerja perusahaan dalam periode itu. Memang, sebagian besar perusahaan melaporkan pendapatan atas ukuran kinerja ringkasan utama dalam bagian pembahasan pada laporan keuangan mereka (Kuswindi et al., 2022).

Yang lebih utama lagi, pendapatan berfungsi atas dasar guna menentukan laba kotor, laba bersih, dan angka laba utama lainnya, seperti laba sebelum bunga dan pajak. Sebuah survei terhadap 400 kepala keuangan (CFO) memperlihatkan bahwasanya pendapatan menempati peringkat kedua atas ukuran kinerja terutama yang dilaporkan atas pihak luar setelah laba dan sebelum arus kas dari operasi (Astarini, 2020).

Pendapatan berguna bagi pengguna laporan keuangan guna memahami sumber keuntungan dan penciptaan nilai perusahaan dalam periode tertentu (Kawatu et al., 2019). Pendapatan membantu pengguna dalam membandingkan target pendapatan dengan pendapatan aktual, dengan melihat bagaimana perusahaan telah mencapai tujuannya, dan dalam membentuk ekspektasi pendapatan masa depan berdasarkan pendapatan masa lalu dan asumsi dalam model prakiraan. Ramadhan (Ramadhan et al., 2023) memberi bukti bahwasanya akrual modal kerja meningkatkan prediksi arus kas dan laba masa depan, sementara akrual lain yang lebih banyak didasarkan pada estimasi manajemen tidak demikian.

Jumlah pendapatan ialah ukuran umum dari ukuran perusahaan (selain kapitalisasi pasar, total aset, dan jumlah karyawan) dan perubahan pendapatan selama beberapa periode ialah ukuran umum pertumbuhan. Pendapatan ialah dasar guna menghitung sejumlah besar rasio keuangan dalam analisis profitabilitas, seperti margin laba dan biaya, perputaran piutang, dan sejenisnya (Anjarwati & Safri, 2022). Beberapa item pada laporan keuangan memberi informasi pelengkap guna pendapatan. Laporan arus kas mencakup arus kas masuk dari penjualan produk dan penyediaan layanan baik secara langsung ataupun tidak langsung (Sukmawati, 2020).

Dalam menilai perusahaan, analisis keuangan sering kali memulai dengan meramalkan pendapatan masa depan berdasarkan pendapatan sebelumnya, permintaan pasar yang disemogakan guna produk dan layanan perusahaan, dan pangsa pasar yang disemogakan (Hasibuan & Fitriantika, 2020). Mereka melihat

keuntungan dalam menggunakan pendapatan daripada laba karena (Iroth et al., 2020): (1) pendapatan lebih persisten daripada biaya dan, akibatnya, laba karena pendapatan lebih homogen; (2) pendapatan mencerminkan perubahan kinerja secara lebih langsung daripada biaya karena banyak biaya yang bersifat kaku, dan (3) pendapatan lebih sulit dikelola daripada laba.

Dengan demikian, pendapatan tidak hanya sekadar mencerminkan hasil penjualan, namun pula memperlihatkan nilai tambah bagi perusahaan yang berasal dari aktivitas inti ataupun tambahan. Pendapatan pula dicatat secara khusus pada laporan laba rugi atas bentuk akuntabilitas atas kontribusi ekonomi perusahaan dalam suatu periode tertentu (Puteh & Sahusilawane, 2023).

Sumber pendapatan suatu perusahaan tidak hanya berasal dari aktivitas utama, namun pula dari aktivitas pendukung. Secara umum, pendapatan dibagi menjadi dua kategori utama (Puteh & Sahusilawane, 2023):

1. Pendapatan Operasional

ialah pendapatan yang diperoleh dari aktivitas inti perusahaan, seperti penjualan produk, penyediaan jasa, pendapatan bunga, komisi, serta fee atas jasa perbankan. Pendapatan ini menjadi tolok ukur utama dalam menilai kinerja perusahaan secara langsung. Dari pendapatan operasional, kita kurangi beban bunga dan tambahkan pendapatan bunga. Selanjutnya, penyesuaian dibuat guna pendapatan ataupun biaya lain yang bukan ialah bagian dari perusahaan inti. Ada sejumlah item lain yang mungkin muncul atas penyesuaian mencapai laba bersih. satu diantaranya ialah pos luar biasa,

yang didefinisikan atas keuntungan ataupun kerugian yang tidak biasa dan jarang ada. Penyesuaian lainnya ialah guna biaya yang terkait dengan penurunan nilai suatu aset.

2. Pendapatan Non-Operasional

ialah pendapatan yang timbul dari aktivitas di luar kegiatan utama, seperti pendapatan dari investasi, penyewaan aset tetap, penjualan aset, dan lain-lain. Meski tidak mencerminkan kinerja operasional langsung, pendapatan ini tetap berkontribusi terhadap laba bersih perusahaan. Misalnya pendapatan per saham. Perusahaan memberi informasi terkait pendapatan saham dalam informasi laporan keuangan tahunan dan triwulanan mereka, serta seperti dalam siaran pers berkala mereka. Umumnya, dihitung atas laba bersih, dibagi dengan jumlah saham yang beredar.

2.1.2.2 Sumber Pendapatan dan Jenis – Jenis Pendapatan

Selain pendapatan dari aktivitas utamanya, perusahaan pula mendapatkan pendapatan dari transaksi lainnya. Oleh karena itu, pendapatan dapat dikategorikan menjadi dua kelompok, yaitu pendapatan operasional dan pendapatan non-operasional.

1. Pendapatan Operasional ialah penghasilan yang diperoleh dari kegiatan operasional utama perusahaan. Pendapatan ini mencerminkan seberapa besar keuntungan yang disemogakan perusahaan dapatkan di masa depan.

Contoh: Pendapatan Bunga, Pendapatan Komisi dan *Fee*, Pendapatan dari Layanan dan Produk.

2. Pendapatan Non-Operasional ialah pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan dari aktivitas di luar kegiatan utama ataupun inti usahanya. Pendapatan ini tidak berasal dari penjualan barang ataupun jasa yang menjadi fokus utama bisnis, melainkan dari sumber-sumber lain yang bersifat tidak rutin ataupun tidak berkelanjutan.

Contoh: Pendapatan Investasi, Pendapatan Sewa, Pendapatan dari Penjualan Aset.

Pendapatan secara umum dapat dibagi menjadi tiga kategori selaras beberapa ahli terkini (2020-2023) (Ramadhan et al., 2023):

1. **Gaji dan Upah:** Imbalan yang diterima seseorang atas kompensasi atas jasanya dalam bekerja guna pihak lain, yang dibayarkan dalam periode harian, mingguan, ataupun bulanan
2. **Penghasilan dari Usaha Lain:** Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas di luar usaha utama perusahaan, yang biasanya ialah tambahan dari kegiatan utama. Contoh termasuk pendapatan dari penyewaan properti seperti rumah ataupun tanah, bunga dari pinjaman, hibah, dan dana pensiun.

2.1.2.3 Pengakuan Pendapatan Berdasarkan PSAK 72

Pengakuan pendapatan dalam akuntansi saat ini mengacu pada PSAK 72, yang ialah adopsi dari standar internasional IFRS 15: *Revenue from Contracts with Customers*. PSAK ini ada efektif di Indonesia sejak 1 Januari 2020 dan menggantikan PSAK 23 yang sebelumnya menjadi acuan utama dalam pengakuan pendapatan.

PSAK 72 bertujuan guna memberi pendekatan yang lebih seragam, transparan, dan berbasis prinsip dalam pengakuan pendapatan. Dalam standar ini, pendapatan diakui ketika entitas memenuhi kewajiban pelaksanaan dalam suatu kontrak, yaitu saat pelanggan mendapatkan kendali atas barang ataupun jasa yang dijanjikan.

Ada lima langkah sistematis dalam pengakuan pendapatan selaras PSAK 72 (Harindra et al., 2023):

1. Mengidentifikasi Kontrak dengan Pelanggan Kontrak harus memiliki persetujuan kedua belah pihak dan hak serta kewajiban yang jelas.
2. Mengidentifikasi Kewajiban Pelaksanaan Setiap janji terpisah guna menyediakan barang ataupun jasa harus diidentifikasi atas kewajiban pelaksanaan.
3. Menentukan Harga Transaksi Harga ditentukan berdasarkan nilai imbalan yang disemogakan diterima entitas atas hasil dari transaksi.

4. Mengalokasikan Harga Transaksi Jika ada lebih dari satu kewajiban pelaksanaan, maka harga transaksi harus dialokasikan secara proporsional berdasarkan nilai relatif masing-masing kewajiban.
5. Mengakui Pendapatan Pendapatan diakui ketika entitas telah memenuhi kewajiban pelaksanaan, baik pada satu titik waktu ataupun secara bertahap.

Penerapan PSAK 72 sangat selaras dalam industri perbankan, termasuk di Bank Perkreditan Rakyat (BPR), di mana pendapatan berasal dari berbagai jasa keuangan seperti pemberian kredit, biaya administrasi, dan komisi. Dengan standar ini, pendapatan baru diakui ketika jasa telah diberikan, bukan semata-mata ketika kas diterima, sehingga mencerminkan prinsip kehati-hatian dan memberi gambaran keuangan yang lebih akurat.

Penggunaan PSAK 72 membantu perusahaan menyusun laporan keuangan yang lebih kredibel dan dapat diandalkan oleh para pemangku keutamaan dalam pengambilan keputusan ekonomi. PSAK 72 memperkenalkan pendekatan berbasis prinsip (*principle-based*) yang memberi kerangka kerja sistematis dalam mengakui pendapatan. Standar ini menekankan pada pengalihan kendali (*transfer of control*) dari barang ataupun jasa atas pelanggan, bukan sekadar penyelesaian risiko dan manfaat seperti pada standar sebelumnya.

Dalam PSAK 72, pendapatan hanya diakui jika lima langkah sistematis telah dipenuhi, yaitu:

1. Mengidentifikasi Kontrak dengan Pelanggan, Langkah pertama ialah memastikan bahwasanya ada kontrak yang sah dan mengikat antara perusahaan dan pelanggan. Kontrak harus memenuhi kriteria tertentu, seperti persetujuan kedua belah pihak, identifikasi hak dan kewajiban, serta kemungkinan bahwasanya imbalan akan diterima.
2. Mengidentifikasi Kewajiban Pelaksanaan dalam Kontrak Kewajiban pelaksanaan ialah janji dalam kontrak guna mengalihkan barang ataupun jasa secara terpisah atas pelanggan. Setiap janji itu harus dianalisis apakah ialah kewajiban pelaksanaan yang berbeda (*distinct performance obligation*). Perusahaan harus mengidentifikasi kewajiban-kewajiban pelaksanaan yang ada dalam kontrak, yaitu janji-janji guna mentransfer barang ataupun jasa yang dapat dibedakan secara terpisah atas pelanggan.
3. Menentukan Harga Transaksi Harga, dalam Langkah ini perusahaan menentukan jumlah imbalan yang disemogakan akan diterima dalam pertukaran guna memenuhi kewajiban pelaksanaan. Harga transaksi bisa bersifat tetap, variabel, ataupun kombinasi keduanya.
4. Mengalokasikan Harga Transaksi ke Kewajiban Pelaksanaan Jika kontrak memiliki lebih dari satu kewajiban pelaksanaan, maka harga transaksi dialokasikan secara proporsional berdasarkan nilai wajar masing-masing kewajiban.
5. Mengakui Pendapatan Saat Kewajiban Pelaksanaan Dipenuhi. Pendapatan diakui ketika entitas memenuhi kewajiban pelaksanaan, yaitu ketika

pengendalian atas barang ataupun jasa dialihkan atas pelanggan. Pemenuhan ini bisa ada secara seketika (*point in time*) ataupun berlangsung selama periode waktu tertentu (*over time*) tergantung pada sifat kontraknya.

2.1.2.4 Relevansi PSAK 72 dalam Konteks Industri Perbankan

Dalam konteks industri perbankan, termasuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR), pengakuan pendapatan tidak hanya berasal dari aktivitas utama seperti pemberian kredit, namun pula dari berbagai sumber seperti biaya administrasi, komisi, dan penalti. Dengan penerapan PSAK 72, BPR disemogakan tidak lagi mengakui pendapatan hanya berdasarkan basis kas (*cash basis*), namun lebih menekankan pada pengakuan berbasis akrual (*accrual basis*) saat kewajiban pelaksanaan telah diselesaikan.

Misalnya, biaya administrasi kredit yang sebelumnya diakui langsung saat kas diterima, kini harus diamortisasi selama jangka waktu kredit jika manfaat jasa diberikan secara bertahap. Hal ini sejalan dengan prinsip kehati-hatian (*prudence*) dan memberi representasi yang lebih andal terhadap kinerja keuangan BPR.

Manfaat Implementasi PSAK 72, antara lain:

1. Meningkatkan transparansi dan konsistensi laporan keuangan antar periode dan antar entitas.
2. Menyajikan informasi pendapatan yang lebih selaras dan dapat diperbandingkan, terutama guna pemangku keutamaan seperti regulator, investor, dan auditor.

3. Meningkatkan kredibilitas laporan keuangan, karena pendapatan dicatat selaras dengan substansi ekonomi dari transaksi, bukan hanya bentuk formalnya.
4. Membantu pengambilan keputusan ekonomi berdasarkan informasi keuangan yang lebih tepat waktu dan akurat.

2.1.3 Beban

2.1.3.1 Definisi Beban

Dalam konteks akuntansi keuangan, beban ialah unsur utama yang mencerminkan pengorbanan ekonomi selama suatu periode pelaporan. Beban dapat ada dalam bentuk arus kas keluar, penurunan nilai aset, ataupun timbulnya kewajiban yang menyebabkan penurunan ekuitas perusahaan, namun tidak berhubungan dengan distribusi atas pemegang saham. Dengan kata lain, beban ialah biaya yang timbul atas konsekuensi dari penggunaan sumber daya dalam kegiatan operasional guna menghasilkan pendapatan (Anjarwati & Safri, 2022).

selaras Ema Sukmawati (Sukmawati, 2020) beban ialah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar ataupun berkurangnya aset, ataupun timbulnya kewajiban yang menyebabkan penurunan ekuitas, yang tidak terkait dengan distribusi atas pemilik. Beban timbul atas akibat dari aktivitas operasional perusahaan, seperti biaya gaji karyawan, penyusutan aset tetap, biaya sewa, bunga, dan beban pajak.

Beban tidak sama dengan pengeluaran; meskipun sering kali melibatkan pengeluaran kas, beban dapat pula timbul tanpa aliran kas langsung, seperti dalam kasus penyusutan ataupun amortisasi. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mendefinisikan beban atas penurunan manfaat ekonomi yang ada selama periode akuntansi, baik dalam bentuk arus keluar kas ataupun meningkatnya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas entitas, dan tidak berasal dari distribusi atas pemegang saham. Sementara itu beban mencakup seluruh pengeluaran dan kerugian yang timbul dari aktivitas bisnis rutin suatu entitas (Khaeria et al., 2023).

Beban ialah pengeluaran yang terukur guna mendapatkan barang ataupun jasa, yang pada akhirnya dibandingkan dengan pendapatan guna menentukan laba bersih. Beban diartikan atas pengeluaran kas ataupun penggunaan sumber daya yang ada dalam suatu periode, umumnya guna mendukung proses produksi, pelayanan jasa, ataupun aktivitas operasional lainnya. Jenis-jenis beban dalam praktik mencakup beban bunga, penyusutan, biaya administrasi umum, serta beban pemasaran (Kuswindi et al., 2022).

Atas tambahan, dalam akuntansi, beban pula mencerminkan konsumsi sumber daya ekonomi yang dipakai guna menghasilkan pendapatan dalam suatu periode tertentu. Beban dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, antara lain beban operasional (seperti beban penjualan dan administrasi), beban non-operasional (seperti beban bunga ataupun kerugian selisih kurs), serta beban langsung dan tidak langsung.

Beban langsung berkaitan langsung dengan proses produksi barang ataupun jasa, sedangkan beban tidak langsung ialah biaya pendukung yang tidak dapat ditelusuri secara langsung ke produk ataupun jasa tertentu. Pengakuan dan pengukuran beban harus mengikuti prinsip-prinsip akuntansi yang ada umum seperti Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia ataupun IFRS secara internasional. Dengan pengakuan beban yang tepat, laporan keuangan dapat memberi informasi yang andal dan selaras bagi pengambilan keputusan ekonomi oleh pengguna laporan itu (Priatna & Puspita, 2019).

Dengan merangkum berbagai definisi itu, dapat disimpulkan bahwasanya beban ialah konsekuensi dari penggunaan barang dan jasa guna menunjang operasi perusahaan, yang secara langsung mempengaruhi laba. Beban tidak berkaitan dengan aktivitas investasi, melainkan lebih erat hubungannya dengan konsumsi sumber daya guna menghasilkan pendapatan. Contoh beban umum mencakup gaji karyawan, perlengkapan kantor, biaya listrik, dan administrasi rutin lainnya.

2.1.3.2 Karakteristik Beban dan Jenis – Jenis Beban

Beban memiliki sejumlah karakteristik yang membedakan dari unsur keuangan lainnya. Karakteristik itu berkaitan dengan asal, pengaruh terhadap ekuitas, serta bentuk pengeluaran baik fisik ataupun moneter. Berikut beberapa karakteristik utama dari beban (Wawointana et al., 2021):

1. Pendekatan Alokasi Beban

Dalam praktik akuntansi, beban dialokasikan ke periode yang selaras agar selaras dengan prinsip matching. Standar akuntansi internasional seperti IAS

dan *Australian Accounting Standards Board* menekankan bahwasanya pengakuan beban harus sejalan dengan pendapatan yang dihasilkan, sehingga laporan keuangan memberi gambaran yang wajar terkait performa entitas.

2. Dipengaruhi oleh Faktor Operasi Utama

Tidak semua aktivitas menimbulkan beban. Hanya aktivitas inti perusahaan seperti produksi dan pelayanan yang menghasilkan beban operasional. Jika aktivitas itu tidak dikelola secara efisien, potensi kerugian finansial pun meningkat.

3. Dipengaruhi oleh Peningkatan Kewajiban

Beban dapat mengakibatkan kewajiban baru yang harus diakui di akhir periode. Misalnya, penggunaan barang ataupun jasa yang tidak dicatat atas aset dapat memunculkan kewajiban di masa mendatang yang menurunkan posisi keuangan perusahaan.

4. Beban mengakibatkan penurunan ekuitas

Tidak semua penurunan nilai aset menyebabkan penurunan ekuitas. Namun, beban yang signifikan seperti beban bunga ataupun kewajiban pajak dapat secara langsung mengurangi ekuitas perusahaan.

5. Dipengaruhi Oleh Arus Fisik ataupun Moneter

Beban sering kali ialah hasil dari konsumsi aset fisik (seperti bahan baku) ataupun aset moneter (seperti kas guna membayar jasa). Arus keluar ini mendeskripsikan pengorbanan sumber daya guna kegiatan operasional.

6. Dipengaruhi Oleh Kerugian Perusahaan

Kerugian yang tidak direncanakan pula termasuk dalam kategori beban, terutama bila timbul akibat kejadian tidak terduga seperti penurunan nilai aset, bencana, ataupun fluktuasi pasar yang drastis. Meski tidak rutin, kerugian semacam ini tetap dicatat atas beban karena mempengaruhi posisi ekuitas.

Guna keperluan analisis dan pelaporan, beban dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai pendekatan. Pengelompokan ini mempermudah proses pencatatan, pengendalian, dan evaluasi kinerja perusahaan. Berikut beberapa pendekatan yang umum dipakai:

1. Beban Berdasarkan Objek Pengeluaran

Klasifikasi ini didasarkan pada jenis objek ataupun kegiatan yang mengakibatkan pengeluaran. Misalnya, pengeluaran guna operasional kantor dicatat atas beban kantor.

2. Pengelompokan Biaya Berdasarkan Fungsi Utama Perusahaan

Beban diklasifikasikan selaras dengan fungsi utamanya dalam proses bisnis. Dalam perusahaan dagang ataupun manufaktur, biaya guna produksi ataupun pengolahan bahan baku menjadi produk akhir dicatat atas beban produksi.

3. Pengelompokan Biaya Berdasarkan Hubungan dan Pengeluaran Tertentu

Kategori ini mempertimbangkan hubungan langsung beban dengan aktivitas ataupun pihak tertentu. Misalnya, gaji karyawan administrasi diklasifikasikan terpisah dari gaji karyawan lapangan, mengingat sifat dan perlakuan akuntansi yang berbeda.

4. Pengelompokkan biaya berdasarkan jangka waktu dan manfaat

Beban dapat diklasifikasikan berdasarkan periode manfaat ekonomisnya. Misalnya, biaya yang memberi manfaat jangka panjang seperti biaya perolehan aset tetap berbeda perlakuannya dibandingkan beban operasional harian. Pendekatan ini membantu perusahaan dalam merencanakan dan mengevaluasi efisiensi penggunaan sumber daya.

2.1.4 Pengakuan

Entitas mengakui aset keuangan jika dan hanya jika entitas menjadi pihak dalam ketentuan kontraktual instrumen keuangan. Pengukuran awal aset keuanganalah nilai wajarnya, yang biasanya ialah pertimbangan yang diberikan, termasuk biaya transaksi yang terkait langsung (Popovici & Bancila, 2023). Pada hakekatnya bahwasanya suatu entitas harus mengakui pendapatan guna mendeskripsikan pengalihan barang ataupun jasa atas pelanggan dalam jumlah yang mencerminkan imbalan yang disemogakan entitas akan menjadi haknya atas imbalan atas barang ataupun jasa itu (Nicholas & Syaiful, 2023).

Dalam konteks keuangan, selaras (Permana et al., 2022) Instrumen utang yang diklasifikasikan pada biaya diamortisasi selanjutnya diakui pada biaya diamortisasi dikurangi penurunan nilai pada laporan posisi keuangan. Pendapatan bunga dan penurunan nilai diakui dalam laba rugi. Pendapatan bunga diakui menggunakan metode suku bunga efektif. Beban penurunan nilai dapat dibalik melalui laba rugi. Keuntungan dan kerugian selisih kurs diakui dalam laba rugi.

Pendapatan bunga dan penurunan nilai diakui dalam laba rugi, menggunakan metodologi yang sama seperti guna biaya perolehan diamortisasi. Pendapatan bunga diakui menggunakan metode suku bunga efektif. Beban penurunan nilai dapat dibalikkan melalui laba rugi. Demikian pula, keuntungan dan kerugian selisih kurs diakui dalam laba rugi seolah-olah instrumen itu dicatat pada biaya perolehan diamortisasi. Selisih antara biaya diamortisasi (dalam mata uang denominasi) dan nilai wajar (dalam mata uang denominasi) diakui pada laporan keuangan saat instrumen dijual.

Pendapatan diakui ketika kewajiban pelaksanaan terpenuhi dengan mengalihkan barang ataupun jasa atas pelanggan. Aset dialihkan ketika pelanggan mendapatkan kendali atas aset itu. Pengendalian atas suatu aset mengacu pada kemampuan guna mengarahkan penggunaan, dan mendapatkan secara substansial seluruh manfaat yang tersisa dari, aset itu. Pengendalian pula mencakup kemampuan guna mencegah entitas lain mengarahkan penggunaan, dan mendapatkan manfaat dari, suatu asset (Budiak & Latjandu, 2021).

Demikian pula, beban diakui pada saat adanya konsumsi atas sumber daya ekonomi dalam rangka menghasilkan pendapatan, meskipun pembayaran mungkin dilakukan di waktu yang berbeda. Oleh karena itu, pengakuan dalam akuntansi sangat utama guna memastikan bahwasanya laporan keuangan mencerminkan posisi keuangan dan kinerja entitas secara wajar, selaras, dan dapat dibandingkan antarperiode (Istanti, 2022). Jika suatu kewajiban kinerja tidak memenuhi kriteria guna dipenuhi seiring waktu, kewajiban itu dipenuhi pada suatu titik waktu. Titik

waktu itu ialah ketika pelanggan mendapatkan kendali atas aset yang dijanjikan dan entitas memenuhi kewajiban kinerja.

Pengakuan mencerminkan waktu dan kondisi saat suatu aset, liabilitas, pendapatan, ataupun beban dimasukkan ke pada laporan keuangan, seperti laporan laba rugi ataupun neraca. Misalnya, pengakuan pendapatan berarti perusahaan mencatat pendapatan itu pada saat tertentu, bukan saat kas diterima, melainkan ketika kinerja telah dilakukan selaras ketentuan kontrak (berdasarkan prinsip akrual). Oleh karena itu, pengakuan yang tepat sangat utama guna mencerminkan kinerja keuangan perusahaan secara akurat dan membantu pemangku keutamaan membuat keputusan yang berdasarkan informasi yang benar.

Pengakuan bertujuan guna memastikan bahwasanya laporan keuangan mencerminkan keadaan dan kinerja keuangan secara jujur dan wajar (*fair and true view*). Contohnya, pendapatan diakui ketika telah diperoleh (*earned*) dan dapat diukur secara andal, sementara beban diakui ketika ada ataupun dikonsumsi guna menghasilkan pendapatan. Dengan kata lain, pengakuan menentukan kapan dan dalam kondisi apa suatu transaksi ataupun peristiwa ekonomi dicatat dan dilaporkan, sehingga mendukung transparansi dan selarasi laporan keuangan bagi para pengguna (Serdarevic & Muratovic-Dedic, 2021).

Atas tambahan, pengakuan dalam akuntansi pula berfungsi atas dasar utama dalam menyusun laporan keuangan yang selaras dengan prinsip akrual, di mana transaksi dicatat saat ada, bukan saat kas diterima ataupun dibayarkan. Proses pengakuan ini mencerminkan keterkaitan erat antara pencatatan akuntansi dan

prinsip-prinsip dasar seperti prinsip kehati-hatian (*prudence*), prinsip keterukuran (*measurability*), serta prinsip periodisasi (Nicholas & Syaiful, 2023).

Dengan penerapan prinsip pengakuan yang tepat dan konsisten, laporan keuangan menjadi alat komunikasi yang andal bagi manajemen, investor, kreditur, regulator, dan pemangku keutamaan lainnya dalam menilai kinerja dan posisi keuangan suatu entitas.

2.1.3.1 Pengakuan Pendapatan

Pengakuan pendapatan mengacu pada prosedur guna menentukan kapan dan bagaimana pendapatan harus diakui pada laporan keuangan. Berdasarkan PSAK 23, pendapatan meliputi hasil dari berbagai sumber, seperti perdagangan, kompensasi, bunga kredit, dividen, honorarium, penyewaan, dan bagi hasil. PSAK 23 menetapkan bahwasanya pendapatan dari penjualan produk hanya dapat diakui oleh perusahaan jika kriteria berikut terpenuhi (Popovici & Bancila, 2023):

1. Entitas telah mengalihkan risiko dan manfaat kepemilikan barang atas konsumen.
2. Perusahaan tidak lagi memiliki kendali atas barang yang dijual.
3. Total Pendapatan yang dapat diukur dengan andal.
4. Biaya yang berhubungan dengan transaksi dapat diukur dengan andal.

Kriteria ini memastikan bahwasanya pengakuan pendapatan dilakukan secara tepat, mencerminkan realitas transaksi yang ada, dan tidak memberi gambaran yang salah terkait kinerja keuangan perusahaan.

Pengakuan pendapatan menggabungkan sejumlah besar transaksi dan peristiwa menjadi beberapa item pada laporan keuangan, yang kemudian digabungkan lebih lanjut dengan menambahkan ataupun mengurangnya satu sama lain guna mendapatkan ukuran kinerja utama, seperti aset bersih (ekuitas), angka pendapatan, dan arus kas dari berbagai aktivitas (Ramadhani & Santoso, 2023).

Pengakuan pendapatan dapat tersusun atas penyertaan informasi tertentu dan mengecualikan yang lain ataupun pemberian bobot pada informasi dan meratakannya. Pengakuan dan pengukuran ialah prosedur agregasi utama, dan persyaratan penyajian dan pengungkapan diadakan guna menyediakan informasi yang tidak teragregasi pada ukuran kinerja utama ini, seperti perincian menjadi komponen utama (Ham et al., 2018).

Pengakuan pendapatan mencakup dua keputusan yang saling terkait: Pertama, kapan harus mengakui ataupun mulai mengakui pendapatan; yang kedua, berapa banyak pendapatan yang harus diakui pada peristiwa pengakuan, yang ialah masalah pengukuran. Keputusan pengakuan didasarkan pada adanya peristiwa utama dalam siklus pendapatan dan fakta bahwasanya pendapatan diakui memberi informasi bahwasanya peristiwa utama ini memang telah ada (Sulbahri et al., 2022).

Jumlah pendapatan dapat mencerminkan estimasi pendapatan yang disemogakan dari kontrak ataupun pendapatan minimum, jika pengukurannya hati-

hati. Pengakuan dini menyiratkan bahwasanya jumlah pendapatan yang diakui masih sangat tidak pasti karena banyak risiko yang belum terselesaikan. Pengakuan yang terlambat menghasilkan jumlah pendapatan yang sangat pasti, namun kurang tepat waktu (Hasibuan & Fitriantika, 2020).

Kriteria yang harus dipenuhi sebelum pendapatan diakui didasarkan pada tahapan siklus pendapatan dan risiko yang diselesaikan dalam masing-masing tahapan. Pada prinsipnya, kemungkinan adanya peristiwa kritis guna pengakuan pendapatan berkisar pada siklus pendapatan penuh, termasuk dimulainya kontrak, produksi, pengiriman, dan pembayaran.

Penelitian ini secara khusus mengkaji dua metode pengakuan pendapatan dini dan akhir, yaitu: metode kontrak selesai dan metode persentase penyelesaian. Karena semua pendapatan akhirnya mengalir melalui laba rugi, total pendapatan ialah sama di kedua metode, namun metode persentase penyelesaian memberi informasi tambahan selama penyelesaian periode. Yustina Elu Ari (Ari et al., 2021) meneliti ukuran berbasis input dan output guna menentukan tingkat penyelesaian yang dipakai dalam metode persentase penyelesaian dan menemukan bahwasanya preferensi mereka bergantung pada produktivitas manajer dan risiko yang ada pada periode masing-masing.

Lebih lanjut Informasi ini seharusnya bermanfaat guna evaluasi kinerja, namun (Suarni & Sulastri, 2020) memperlihatkan bahwasanya informasi dapat merugikan jika renegotiasi kontrak kompensasi tidak dapat dikecualikan. Alasannya ialah bahwasanya kompensasi pada periode selanjutnya dapat, dan akan,

diselaraskan berdasarkan kinerja awal, yang menciptakan insentif bagi manajer guna menyimpang dari keputusan optimal pada periode awal. guna mengoptimalkan total kompensasi yang disemogakan, mengantisipasi penyesuaian itu. Di sisi lain, negosiasi ulang berguna jika informasi yang tidak dapat diverifikasi tersedia selama jangka waktu kontrak. guna misalnya, (Puteh & Sahusilawane, 2023) memperlihatkan bahwasanya dalam kasus ini metode persentase penyelesaian dapat menjadi lebih banyak diterapkan.

Pengakuan pendapatan mengacu pada prosedur guna menentukan kapan dan bagaimana pendapatan harus diakui pada laporan keuangan. Berdasarkan PSAK 23, pendapatan meliputi hasil dari berbagai sumber, seperti perdagangan, kompensasi, bunga kredit, dividen, honorarium, penyewaan, dan bagi hasil. PSAK 23 menetapkan bahwasanya pendapatan dari penjualan produk hanya dapat diakui oleh perusahaan jika kriteria berikut terpenuhi (Popovici & Bancila, 2023):

5. Entitas telah mengalihkan risiko dan manfaat kepemilikan barang atas konsumen.
6. Perusahaan tidak lagi memilki kendali atas barang yang dijual.
7. Total Pendapatan yang dapat diukur dengan andal.
8. Biaya yang berhubungan dengan transaksi dapat diukur dengan andal.

Kriteria ini memastikan bahwasanya pengakuan pendapatan dilakukan secara tepat, mencerminkan realitas transaksi yang ada, dan tidak memberi gambaran yang salah terkait kinerja keuangan perusahaan.

Pengakuan pendapatan menggabungkan sejumlah besar transaksi dan peristiwa menjadi beberapa item pada laporan keuangan, yang kemudian digabungkan lebih lanjut dengan menambahkan ataupun mengurangnya satu sama lain guna mendapatkan ukuran kinerja utama, seperti aset bersih (ekuitas), angka pendapatan, dan arus kas dari berbagai aktivitas (Ramadhani & Santoso, 2023).

Pengakuan pendapatan dapat tersusun atas penyertaan informasi tertentu dan mengecualikan yang lain ataupun pemberian bobot pada informasi dan meratakannya. Pengakuan dan pengukuran ialah prosedur agregasi utama, dan persyaratan penyajian dan pengungkapan diadakan guna menyediakan informasi yang tidak teragregasi pada ukuran kinerja utama ini, seperti perincian menjadi komponen utama (Ham et al., 2018).

Pengakuan pendapatan mencakup dua keputusan yang saling terkait: Pertama, kapan harus mengakui ataupun mulai mengakui pendapatan; yang kedua, berapa banyak pendapatan yang harus diakui pada peristiwa pengakuan, yang ialah masalah pengukuran. Keputusan pengakuan didasarkan pada adanya peristiwa utama dalam siklus pendapatan dan fakta bahwasanya pendapatan diakui memberi informasi bahwasanya peristiwa utama ini memang telah ada (Sulbahri et al., 2022).

Jumlah pendapatan dapat mencerminkan estimasi pendapatan yang disemogakan dari kontrak ataupun pendapatan minimum, jika pengukurannya hati-hati. Pengakuan dini menyiratkan bahwasanya jumlah pendapatan yang diakui masih sangat tidak pasti karena banyak risiko yang belum terselesaikan. Pengakuan

yang terlambat menghasilkan jumlah pendapatan yang sangat pasti, namun kurang tepat waktu (Hasibuan & Fitriantika, 2020).

Kriteria yang harus dipenuhi sebelum pendapatan diakui didasarkan pada tahapan siklus pendapatan dan risiko yang diselesaikan dalam masing-masing tahapan. Pada prinsipnya, kemungkinan adanya peristiwa kritis guna pengakuan pendapatan berkisar pada siklus pendapatan penuh, termasuk dimulainya kontrak, produksi, pengiriman, dan pembayaran.

Penelitian ini secara khusus mengkaji dua metode pengakuan pendapatan dini dan akhir, yaitu: metode kontrak selesai dan metode persentase penyelesaian. Karena semua pendapatan akhirnya mengalir melalui laba rugi, total pendapatan ialah sama di kedua metode, namun metode persentase penyelesaian memberi informasi tambahan selama penyelesaian periode. Yustina Elu Ari (Ari et al., 2021) meneliti ukuran berbasis input dan output guna menentukan tingkat penyelesaian yang dipakai dalam metode persentase penyelesaian dan menemukan bahwasanya preferensi mereka bergantung pada produktivitas manajer dan risiko yang ada pada periode masing-masing.

Lebih lanjut Informasi ini seharusnya bermanfaat guna evaluasi kinerja, namun (Suarni & Sulastri, 2020) memperlihatkan bahwasanya informasi dapat merugikan jika renegotiasi kontrak kompensasi tidak dapat dikecualikan. Alasannya ialah bahwasanya kompensasi pada periode selanjutnya dapat, dan akan, diselaraskan berdasarkan kinerja awal, yang menciptakan insentif bagi manajer guna menyimpang dari keputusan optimal pada periode awal. guna

mengoptimalkan total kompensasi yang disemogakan, mengantisipasi penyesuaian itu. Di sisi lain, negosiasi ulang berguna jika informasi yang tidak dapat diverifikasi tersedia selama jangka waktu kontrak. guna misalnya, (Puteh & Sahusilawane, 2023) memperlihatkan bahwasanya dalam kasus ini metode persentase penyelesaian dapat menjadi lebih banyak diterapkan.

2.1.3.2 Pengakuan Beban

Pengakuan beban dalam akuntansi ialah proses pencatatan beban ke pada laporan laba rugi pada periode adanya konsumsi manfaat ekonomi dari suatu sumber daya, selaras dengan prinsip akuntansi yang ada (Istanti, 2022).

Beban diakui ketika ada defiasi manfaat ekonomi dalam bentuk pengeluaran ataupun berkurangnya kas, ataupun timbulnya utang yang menyebabkan penurunan ekuitas, dan tidak berkaitan dengan distribusi atas pemilik. Proses pengakuan ini mengikuti prinsip pencocokan (*matching principle*), yaitu beban dicatat pada periode yang sama dengan pendapatan yang dihasilkan oleh beban itu, guna mencerminkan kinerja keuangan secara akurat (Serdarevic & Muratovic-Dedic, 2021).

Tujuan utama pencatatan beban ialah guna mencerminkan secara akurat kinerja keuangan perusahaan dalam satu periode, sehingga pemangku keutamaan dapat menilai efisiensi dan profitabilitas operasional entitas itu.

Dalam penerapannya, pengakuan beban pula mempertimbangkan prinsip periodisasi, di mana beban dicatat selaras periode akuntansi adanya transaksi,

bukan saat kas dibayar. Beban dapat berupa pengeluaran aktual, seperti pembayaran gaji, ataupun beban non-kas, seperti penyusutan aset tetap. Dengan pengakuan beban yang tepat, laporan keuangan dapat memperlihatkan tingkat efisiensi dan profitabilitas perusahaan secara wajar dan dapat dipercaya oleh pengguna laporan keuangan (Jung et al., 2021).

Atas tambahan, pengakuan beban pula melibatkan penilaian profesional guna memastikan bahwasanya beban yang dicatat benar-benar mencerminkan konsumsi sumber daya yang selaras dalam periode berjalan, sehingga tidak menimbulkan distorsi pada laporan keuangan. Beban yang diakui secara berlebihan ataupun tidak tepat waktu dapat menyebabkan laporan laba rugi menjadi tidak akurat dan menyesatkan pengguna laporan, seperti investor, kreditur, dan manajemen (Nicholas & Syaiful, 2023).

Selain itu, pengakuan beban harus selaras dengan standar akuntansi yang ada, seperti Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia ataupun IFRS secara internasional, yang memberi pedoman terkait kapan dan bagaimana beban harus diakui dan diukur. Dengan demikian, pengakuan beban yang tepat tidak hanya membantu mencerminkan kinerja keuangan secara akurat, namun pula mendukung transparansi dan konsistensi dalam pelaporan keuangan perusahaan.

Pengakuan beban dapat dikategorikan dalam empat kelompok atas berikut (Santoso & Erlina, 2020):

1. Pencocokan Biaya dan Pendapatan

Dalam prinsip akuntansi, beban diakui ketika ada pencocokan dengan pendapatan yang dihasilkan selama periode akuntansi yang sama. Hal ini memastikan bahwasanya laporan keuangan mencerminkan biaya yang dikeluarkan guna mendapatkan pendapatan yang selaras.

2. Pengalokasian Sistematis dan Rasional

Pengalokasian biaya dilakukan dengan cara yang sistematis dan rasional, guna memastikan bahwasanya beban diakui secara tepat seiring dengan manfaat yang diperoleh dalam periode yang selaras.

3. Pengeluaran Modal dengan Jangka Waktu Ekonomi Lebih dari Satu Tahun

Biaya yang terkait dengan pengeluaran modal yang memiliki manfaat lebih dari satu periode akuntansi, biasanya harus diakui dan disusutkan selama masa manfaatnya.

4. Pengakuan Langsung Beban

Beban yang menghasilkan manfaat ekonomi dalam periode yang sama dengan adanya beban itu dapat diakui langsung. Contoh beban ini ialah biaya yang mendukung pendapatan yang diperoleh dalam periode yang bersangkutan.

2.1.5 Pengukuran, Penyajian dan Pengakuan

Pengukuran diartikan atas proses penentuan besarnya nilai moneter dari unsur-unsur laporan keuangan, seperti aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban, yang akan dicatat dan disajikan pada laporan keuangan. Tujuan dari

pengukuran ialah guna memberi nilai yang dapat diandalkan dan selaras sehingga informasi pada laporan keuangan dapat dipakai secara efektif oleh para pemangku keutamaan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Pengukuran ini dikurangi dengan diskon ataupun kredit yang diberikan atas konsumen (Dwi Muharomawati et al., 2021).

Dalam konteks beban, umumnya perusahaan menggunakan biaya historis ataupun biaya penggantian atas metode pengukuran. Biaya historis sering dipakai, karena mencatat pengeluaran berdasarkan jumlah yang dikeluarkan saat mendapatkan barang ataupun jasa yang dimaksud, berangkat dari pendapat Yushu Cao and Song (Cao & Song, 2023). Pengukuran dilakukan dengan menggunakan dasar-dasar tertentu yang diakui dalam standar akuntansi, seperti biaya historis, nilai kini, nilai realisasi ataupun nilai wajar, dan nilai yang dapat direalisasikan bersih.

Pilihan dasar pengukuran tergantung pada sifat unsur yang diukur, tujuan pelaporan, dan selarasi informasi bagi pengguna laporan keuangan (...). Oleh karena itu, pengukuran tidak hanya soal angka, namun pula melibatkan pertimbangan profesional dan kebijakan akuntansi guna memastikan bahwasanya nilai yang disajikan mencerminkan kondisi keuangan entitas secara andal dan transparan.

Perusahaan hanya boleh mengakui pendapatan atas kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi seiring waktu jika perusahaan itu dapat mengukur kemajuannya secara wajar menuju pemenuhan kewajiban pelaksanaan secara menyeluruh

menggunakan informasi yang andal. Dalam beberapa kasus (misalnya, pada tahap awal kontrak), perusahaan tidak dapat mengukur hasil kewajiban pelaksanaan secara wajar, namun berharap dapat memulihkan biaya yang dikeluarkan dalam memenuhi kewajiban pelaksanaan itu. Dalam keadaan itu, perusahaan harus mengakui pendapatan hanya sebesar biaya yang dikeluarkan hingga perusahaan dapat mengukur hasil kewajiban pelaksanaan secara wajar (Sheppard & Mahdad, 2021).

Berdasarkan PSAK No. 72, pendapatan dari kontrak dengan pelanggan menetapkan bahwasanya pengakuan pendapatan dilakukan berdasarkan pemenuhan kewajiban pelaksanaan oleh perusahaan atas pelanggan. Pendapatan diakui ketika pengendalian atas barang ataupun jasa telah dialihkan atas pelanggan, bukan semata-mata ketika pembayaran diterima. Standar ini menekankan prinsip bahwasanya pendapatan mencerminkan imbalan yang secara ekspektasi akan diterima perusahaan atas imbalan atas barang ataupun jasa yang telah diserahkan (Puteh & Sahusilawane, 2023).

2.1.6 Pedoman Akutansi Bank Perekonomian Rakyat

Laporan keuangan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) bertujuan guna memberi informasi terkait posisi keuangan, kinerja perusahaan, dan perubahan posisi keuangan. Selain itu, laporan keuangan BPR pula bertujuan membantu manajemen dalam pengambilan keputusan yang bermanfaat bagi perusahaan di masa depan (Dwi Utami et al., 2023).

Laporan keuangan berfungsi dengan baik jika disusun selaras dengan prinsip dan standar akuntansi yang ada umum, serta mencerminkan kondisi keuangan dan kinerja suatu perusahaan secara selaras, andalan, komparatif, dan dapat dipahami (Napitupulu & Puspitasari, 2024). Artinya, informasi yang disajikan harus mendeskripsikan kenyataan ekonomi yang sebenarnya, bebas dari kesalahan material dan bias, serta disusun secara konsisten agar dapat dibandingkan antarperiode ataupun antarperusahaan. Selain itu, laporan keuangan akan berfungsi optimal jika didukung oleh sistem pencatatan yang akurat, pengendalian internal yang memadai, serta transparansi dalam penyajian informasi. Laporan yang baik pula harus memenuhi kebutuhan para pengguna, seperti investor, kreditur, manajemen, regulator, dan pemangku keutamaan lainnya, atas dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi, penilaian kinerja, ataupun penentuan strategi bisnis di masa depan (Gita Mapaza et al., 2022).

Pedoman akuntansi ini bertujuan guna (Napitupulu & Puspitasari, 2024):

1. Menstandarkan praktik pencatatan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi keuangan yang dilakukan oleh BPR.
2. Menyajikan laporan keuangan yang selaras, andal, dan dapat diperbandingkan oleh para pemangku keutamaan.
3. Menyesuaikan dengan karakteristik kegiatan usaha BPR yang lebih sederhana dibandingkan bank umum, namun tetap mengikuti prinsip akuntansi yang ada umum.

Pedoman akuntansi BPR mencakup seluruh aspek utama dalam pelaporan keuangan, di antaranya (Hari et al., 2021):

1. Pengakuan dan pengukuran pendapatan dan beban (termasuk bunga, denda, komisi, dan biaya administrasi)
2. Penyisihan kerugian atas aktiva produktif
3. Pencatatan aset tetap dan penyusutan
4. Transaksi kredit dan simpanan nasabah
5. Pengungkapan pada Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pedoman itu disusun agar selaras dengan kebutuhan praktis industri BPR, yang cenderung lebih sederhana dan langsung serta Mendukung transparansi dan pengawasan oleh OJK atas regulator.

2.1.7 Penelitian Terdahulu

Dalam garis besar penelitian, ada beberapa penelitian terdahulu yang menjadi dasar teoritis dan empiris yang selaras dengan topik kajian. Dengan mengulas hasil dari peneliti terdahulu, ditemukan beberapa *research gap* dan keterbatasan guna kemudian diinterpretasikan lebih luas menjadi novelty atas penelitian kualitatif ini.

Pertama, penelitian oleh Dharma B., Pratiwi A. I., Melati (2023) yang bertajuk “*Analisis Laporan Keuangan Pengelolaan Limbah Kelapa Sawit atas PT. Perkebunan Nusantara III Persero Labuhanbatu Selatan*” dengan basis metode

kualitatif analisis deskriptif dan komparatif. Secara sistematis Dharma B., dkk mengungkapkan bahwasanya atas PT. Perkebunan Nusantara III Persero Labuhanbatu Selatan, beban diakui pada laporan keuangan dengan dasar yang dipakai yaitu basis akrual (beban diakui pada saat adanya transaksi). Perusahaan telah menerapkan metode pengakuan pendapatan selaras dengan PSAK.72 yaitu pendapatan diakui pada saat aset dipindahkan atas pelanggan.

Kedua, penelitian oleh Caroline., et al (2024) yang bertajuk “*Pengaruh Pengakuan Pendapatan Operasional dan Biaya Operasional terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan*” dengan basis metode kuantitatif analisis regresi linier berganda. Secara sistematis Caroline., et al mengungkapkan bahwasanya Pendapatan operasional dan biaya operasional signifikan berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Dibuktikan melalui Nilai Koefisien Determinasi R dengan persentase 38,1%, sedangkan faktor lain mempengaruhi 61,50%.

Ketiga, penelitian oleh Sibarani, B. B. (2021) yang bertajuk “*Penerapan PSAK 71 atas PT Bank IBK Indonesia Tbk*” dengan basis metode kualitatif. Secara sistematis Sibarani mengungkapkan bahwasanya dalam hal ada penurunan nilai berlandaskan PSAK 71, kerugian penurunan nilai dilaporkan atas pengurang dari nilai tercatat dari aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang dan diakui di pada laporan laba rugi.

Keempat, penelitian oleh Sondakh et al., (2021) yang bertajuk “*Evaluasi Pengakuan Pendapatan atas PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Primaesa Sejahtera Manado*” dengan basis metode deskriptif kualitatif. Secara sistematis

Sondakh et al., mengungkapkan bahwasanya guna pendapatan bunga kredit yang diklasifikasikan kredit *performing* diakui secara *accrual basis*, sedangkan guna pendapatan bunga kredit yang diklasifikasikan *non performing* diakui secara *cash basis*. Adapun pendapatan diluar pendapatan bunga, yaitu pendapatan operasional lainnya dan pendapatan non operasional diakui berdasarkan SAK ETAP dan PA BPR.

Kelima, penelitian oleh Budiak & Latjandu (2021) yang bertajuk “*Analisis Pengakuan Pendapatan dan Beban dalam Perspektif PSAK 23 atas PT Pegadaian*” dengan basis metode kualitatif. Secara sistematis Budiak & Latjandu mengungkapkan bahwasanya PT Pegadaian mengungkapkan laporan keuangan selaras dengan PSAK 23. Dalam pengakuan pendapatan dan beban menggunakan Accrual Basis karena pemasukan dan pengeluaran diakui pada saat transaksi ada. Pendapatan utama itu bersumber dari pendapatan administrasi, uang kelebihan lewat waktu, pendapatan sewa modal, dan penjualan barang sisa lelang. Sedangkan guna beban berasal dari beban asuransi, beban penyusutan dan beban administrasi.

Keenam, penelitian oleh Dwi Urip Wardoyo et al., (2021) yang bertajuk “*Analisis Pengakuan dan Pengukuran atas Pendapatan PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Pahlawan Palembang*” dengan basis metode deskriptif kualitatif. Secara sistematis Dwi Urip Wardoyo et al., mengungkapkan bahwasanya pengakuan dan pengukuran pendapatan perusahaan bank itu menggunakan 2 (dua) metode pendapatan, yaitu cash basis dan accrual basis. Pengukuran pendapatan berdasarkan

nilai wajar dari imbalan yang diterima dalam bentuk kas ataupun setara kas yang selaras dengan standar akuntansi keuangan.

Ketujuh, penelitian oleh Hernis (2020) yang bertajuk “*Analisis Pengakuan Pendapatan dan Biaya atas PT. Pegadaian Cabang CP Baubau Tahun 2019-2020*” dengan basis metode kualitatif. Secara sistematis Hernis mengungkapkan bahwasanya perusahaan bank itu mengakui pendapatan menggunakan metode basis kas yang mana pendapatan diakui pada saat jasa dinikmati oleh nasabah dan selaras dengan jumlah nominal yang disepakati sejalan dengan PSAK No. 23.

Kedelapan, penelitian oleh Ermawijaya (2021) yang bertajuk “*Analisis Pengakuan Pendapatan Dan Beban Jasa Kontruksi Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Perusahaan Tanpa Akuntabilitas Publik (Sak Etap) atas PT Puks Ujung Gading Kab. Pasaman Barat*” dengan basis metode kuantitatif. Secara sistematis Ermawijaya mengungkapkan bahwasanya pengakuan pendapatan dan beban di perusahaan bank itu sudah selaras dengan SAK ETAP, dengan tingkat keselarasan 75% guna pendapatan dan 80% guna beban. Namun, ada beberapa kesalahan yang berkaitan dengan teknis dan ketidak-akuratan.

Kesembilan, penelitian oleh Hasibuan & Fitriantika (2020) yang bertajuk “*Analisis Pengakuan Pendapatan dan Biaya atas PT Ransoe Pilar Utama Tanjung Morawa*” dengan basis metode deskriptif kualitatif. Secara sistematis Hasibuan & Fitriantika mengungkapkan bahwasanya PT Ransoe Pilar Utama Tanjung Morawa masih menggunakan metode basis kas dalam pengakuan pendapatan dan beban.

Metode ini tidak selaras dengan SAK-ETAP, yang mengharuskan penggunaan basis akrual dalam pengakuan pendapatan dan beban.

2.1.8 Kerangka Pemikiran

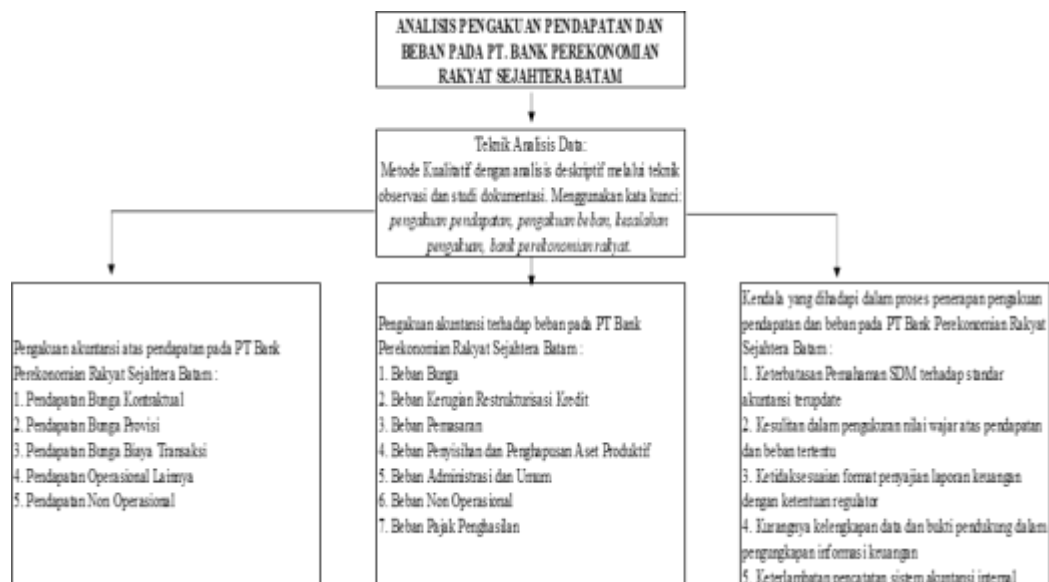
Penelitian ini berangkat dari utamanya akurasi dalam pengakuan pendapatan dan beban pada lembaga keuangan, khususnya atas PT. Bank Perekonomian Rakyat Sejahtera Batam, yang berperan signifikan dalam mendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Dalam praktiknya, kesalahan dalam pengakuan pendapatan dan beban dapat berdampak pada ketidakwajaran laporan keuangan, memengaruhi pengambilan keputusan manajerial, serta berpotensi melanggar ketentuan akuntansi dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Secara teori, pengakuan pendapatan dan beban harus mengikuti prinsip-prinsip dasar akuntansi seperti *matching principle* dan *accrual basis*, serta merujuk pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang ada. Namun, dalam praktik di lapangan, tidak sedikit bank yang mengalami kendala dalam penerapan standar itu secara konsisten, baik karena keterbatasan sumber daya manusia, sistem pelaporan keuangan yang belum memadai, ataupun adanya tekanan dari pihak manajemen guna menampilkan kondisi keuangan yang tampak sehat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif guna menggali secara mendalam praktik dan pemahaman pengakuan pendapatan dan beban dalam ruang lingkup akuntansi, serta mengidentifikasi potensi kesalahan pengakuan, seperti pengakuan pendapatan sebelum waktunya (*premature revenue recognition*) ataupun pengakuan beban yang ditunda (*deferred expense recognition*). Dengan

teknik analisis data deskriptif, peneliti akan mendeskripsikan proses pengakuan yang dijalankan oleh bank, membandingkannya dengan ketentuan yang ada, serta mengidentifikasi area yang rawan ada kesalahan ataupun ketidakselarasan.

Analisis data dimulai dengan identifikasi masalah, pencarian sumber literatur dan observasi, klasifikasi data, reduksi data, dan interpretasi data. Langkah-langkah diselaraskan dengan prosedur penelitian hingga pada implikasi.



Sumber: (Peneliti, 2025)

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran